



INDUSTRI

## Ekonomi Kreatif Dukung Pariwisata

DINAS Pariwisata Kota Yogyakarta akan mengoptimalkan peran ekonomi kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata, salah satunya melalui kegiatan promosi pariwisata.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono, Selasa (11/7), menyatakan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari ekonomi kreatif.

"Jika ingin mengembangkan potensi pariwisata dengan optimal, maka peran ekonomi kreatif dan industri kreatif harus dilibatkan secara maksimal," kata dia.

Salah satu wisata unggulan di Kota Yogyakarta adalah wisata belanja yang tersebar di beberapa kawasan, salah satunya pasar tradisional terbesar di Kota Yogyakarta, Beringharjo.

Wisata belanja sangat didukung oleh peran industri kreatif yang ada di Yogyakarta dan jika tidak digandeng menjadi bagian penting pariwisata maka potensi wisata belanja tidak akan optimal.

"Itu hanya salah satu contoh saja, masih ada banyak sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif yang berperan dalam pengembangan pariwisata misalnya saja *fashion*, kriya dan banyak hal lainnya," katanya.

Tahun ini Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melakukan kajian atau konsultasi untuk menyiapkan Kota Yogyakarta sebagai kota kreatif yang mendukung pengembangan pariwisata.

Pada pengembangan ekonomi kreatif atau industri kreatif ini, Dinas Pariwisata memiliki tugas untuk mempromosikan potensi ekonomi kreatif, sedangkan proses pembinaan dan pengembangan menjadi ranah dari instansi lain yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Yunianto menambahkan, Badan Ekonomi Kreatif juga akan memetakan potensi industri kreatif di Indonesia. "Yogyakarta sebagai salah satu kota yang memiliki potensi tersebut akan berupaya menyampaikan potensi unggulannya. Tentunya, akan diutamakan potensi industri kreatif yang berbasis budaya," katanya.

Seluruh potensi unggulan industri kreatif dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut akan dirangkum sehingga muncul peta ekonomi kreatif secara nasional.

**Raperda**

Terkait dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah selesai dibahas, tidak dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah karena ditolak oleh Biro Hukum Pemerintah DIY.

Ketua Panitia Khusus Raperda Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Rifki Listianto, menyatakan pihaknya belum mengetahui alasan penolakan rancangan peraturan daerah tersebut karena surat baru diterima dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

"Pansus akan mempelajari surat penolakan tersebut sekaligus meminta pimpinan DPRD Kota Yogyakarta dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk berkomunikasi dengan Pemerintah DIY," ungkapnya.

Rifki menilai, raperda tersebut dibutuhkan dan seharusnya dapat dilanjutkan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah karena di beberapa daerah lain sudah memiliki peraturan serupa.

"Kami melakukan kunjungan ke Jawa Timur dan tidak ada masalah dengan Perda Ekonomi Kreatif. Untuk di DIY, memang baru Kota Yogyakarta saja yang mengajukan perda ini," katanya.

Anggota Pansus Raperda Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Nasrul Khoiri, menambahkan raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Kota Yogyakarta. "Kami masih menunggu langkah dari pimpinan terkait surat dari Pemerintah DIY," katanya.

Kepala Biro Hukum Pemerintah DIY, Dewo Isnur Broto Imam Santosa mengatakan, raperda tersebut ditolak karena materi yang diatur belum terperinci, dan ada beberapa yang sudah diatur

Netral  Biasa  Jumpa Pers

dalam regulasi lain.

Biro Hukum Setda DIY kemudian menyarankan agar pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif cukup dilakukan dengan optimalisasi program atau kegiatan dari organisasi pe-rangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

**Survei**

Berkembangnya ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta, menarik minat Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Dua lembaga itu memilih Yogyakarta sebagai lokasi survei data. Sedangkan empat provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Sumatra Utara, Jawa Timur dan Bali. Ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dan memperkaya data ekonomi kreatif Indonesia.

Kepala Bekraf, Triawan Munaf, memaparkan pemilihan lima provinsi tersebut berdasar pada pertumbuhan ekonomi kreatif (ekraf) di masing-masing provinsi yang dinilai layak dijadikan contoh. Ekonomi kreatif yang dimaksud mencakup enam subsektor yang menjadi konsentrasi BPS-Bekraf.

Lima provinsi itu semua sudah bisa dijadikan contoh, sampel yang mendekati sangat akurat untuk mewakili seluruh Indonesia.

"Tentunya idealnya seluruhnya bisa diukur secara detail, tapi sekarang kita lebih memenuhi semua itu dengan keterbatasan yang ada. Anggaran kami (Bekraf) juga terbatas," kata dia.

Dari 16 subsektor ekonomi kreatif pihaknya menginginkan konsentrasi di enam subsektor dengan rincian tiga yang sudah besar, tiga yang jadi prioritas untuk dikembangkan dan tiga yang sudah besar itu selain sudah besar dan percepatan pertumbuhannya luar biasa di Indonesia namun juga percepatan pertumbuhan ekspornya juga luar biasa.

Sebelumnya pada tahun 2016, Bekraf meng-gebet BPS dalam penyediaan data Produk Domestik Bruto (PDB), tenaga kerja, ekspor, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan Survei Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK) 2016.

Tahun ini, BPS-Bekraf tidak hanya akan memperbarui data tahun lalu, tetapi juga menambah jumlah cakupan data, meliputi profil usaha subsektor berdasarkan Survei Ekonomi 2016, penyediaan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta Tabel Input-Output (I-O) ekraf.

Berdasarkan hasil SKEK 2016, tiga subsektor ekraf yang menjadi primadona adalah *fashion*, kriya, dan kuliner. Sedangkan usaha/perusahaan *start up* bidang ekraf cenderung dijumpai pada subsektor aplikasi dan *games developer*, industri musik, serta perfilman.

Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, menekankan percepatan penyelesaian data akan dilakukan dengan menggabungkan data Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Khusus Ekonomi Kreatif 2016. Diharapkan, data baru bisa diluncurkan pada Desember 2017.

"Untuk bisa mengumpulkan data ekonomi kreatif, kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu survei, karena itu kita akan meng-*combine* berbagai sensus dan survei yang ada di BPS. Kita bikin target Desember 2017, hasilnya bisa diluncurkan, tahun 2018 sudah bisa digunakan," kata Kecuk.

Data ekraf dari BPS-Bekraf sukses meraih capaian-capaian positif. Pada tahun 2015, sektor ekraf berkontribusi 7,38 persen terhadap total perekonomian nasional. PDB ekraf yang tercipta tahun 2015 adalah sebesar Rp 852 triliun, naik 4,38 persen dibandingkan tahun 2014.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ekraf mampu menyerap 15,9 juta tenaga kerja atau 13,90 persen dari total tenaga kerja tahun 2015. Indikator lain yaitu ekspor barang-barang ekraf senilai 19,4 miliar dolar AS atau 12,88 persen dari total ekspor Indonesia tahun 2015. ●

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005